

**KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR PADA TAHUN 2018**

(Skripsi)

Oleh

RIZEKI KURNIAWAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PADA TAHUN 2018

Oleh
RIZEKI KURNIAWAN

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki daerah kelautan dan pesisir yang cukup luas adalah Provinsi Lampung, luas lautnya diperkirakan seluas 24.820 km², meliputi jarak 12 mil dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengelolaan laut berupaya mengoptimalkan sumber daya laut dan masalah di perairan pesisir tersebut dengan mengeluarkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), program tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran antara lain peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, dan pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2018 yaitu masukan (*input*) berupa jumlah SDM dan sarjana kelautan masih minim, dan ketersediaan dana belum mencukupi; proses (*process*) berupa prosedur yang dilakukan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, prosedur pelaksanaan program mengikuti perencanaan tahunan dalam bentuk RPJMD 2015 – 2019 yang menjadi acuan dalam perencanan program pembangunan di Provinsi Lampung lalu dijabarkan kedalam RENSTRA dan ketetapan waktu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019; keluaran (*output*) berupa kegiatan program yang terdapat 11 kegiatan hanya 5 kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018; hasil (*outcome*) berupa pencapaian tujuan yang belum mencapai target dari Indikator Kinerja Utama yaitu luas kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat pengelolaannya, dan dampak terhadap masyarakat sudah baik.

Kata Kunci : Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Kinerja, Program

ABSTRACT

PERFORMANCE OF MARINE AND FISHERIES DEPARTMENT LAMPUNG PROVINCE ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM IN COASTAL COMMUNITIES IN THE YEAR 2018

**By
RIZEKI KURNIAWAN**

One province in Indonesia which has a marine and coastal areas that are wide enough Lampung Province, the sea area covering 24 820 km² estimated, covering a distance of 12 miles of coastline which is under the authority of Lampung Province marine waters. Marine and Fisheries Agency of Lampung Province as an institution responsible for the development and ocean management attempts to optimize the marine resources and problems in coastal waters by issuing program Economic Empowerment of Coastal Communities (PEMP), the program is guided by the Medium Term Development Plan (RPJMD). Coastal community economic empowerment program aims to realize a well-organized and utilization of marine, coastal and small islands in a sustainable manner, with the objective, among others, increase the area of water conservation are managed sustainably, and development management of small islands. Type of research used is descriptive research type with qualitative approach. Then pegumpulan techniques of data by interview, documentation and observation.

Results from this study showed that the performance of Marine and Fisheries Agency of Lampung Province in 2018, namely the input (input) in the form of HR and maritime scholars still minimal, and the availability of sufficient funds; process (process) in the form of procedures carried out in the economic empowerment of coastal communities, the procedure of the program following the annual planning in the form of RPJMD 2015-2019 as reference in planning development programs in Lampung Province and then translated into RENSTRA and punctuality are already well underway in accordance with the periodization RPJMD Lampung province Years 2015-2019; output (output) in the form of program activities contained 11 activities only 5 activities carried out in 2018; results (outcomes) in the form of achievement of the objectives that have not reached the target of Key Performance Indicators that extensive coastal areas and small islands which increased its management, and the impact on the community is good.

Keywords : Economic empowerment of coastal communities, Performance, Program

**KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR PADA TAHUN 2018**

Oleh

RIZEKI KURNIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PADA TAHUN 2018**

Nama Mahasiswa : **Rizeki Kurniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041114

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001

Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 20050 1 1003

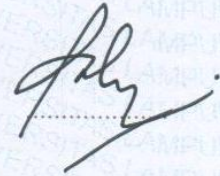
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **9 Desember 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 9 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,



Rizeki Kurniawan
NPM : 1516041114

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizeki Kurniawan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 November 1997. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Alim Makmur, SH.MH dan Ibu Yunani Farianti. Penulis memulai pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Tut Wuri Handayani pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2003.

Kemudian Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Kartika II – 5 Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur ujian mandiri tertulis. Penulis tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) dan menjabat sebagai Sekertaris Umum pada pengurusan tahun 2017 - 2018.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Surat Asy Syarh ayat 5-6)

**“Kepemimpinan bukan bagaimana kita mengatur orang lain mengikuti kita,
namun bagaimana kita mengatur diri agar diikuti orang lain.”**

(Naqoy Yusuf)

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya).

“Puncaknya ilmu adalah takut kepada Allah”

(Rizeki Kurniawan)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT

Telah kuselesaikan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya ini untuk:

Mama dan Papaku Tercinta,

*Yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan,
pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.*

Kakakku yang tersayang,

Terima kasih atas doa serta dukungan semangat selama ini untukku.

Keluarga besar dan sahabat,

yang selalu memberikan doa serta dukungannya.

Para Pendidik

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku dosen utama. Terima kasih bu atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik mendapatkan

keberkahan dari Allah SWT dan semoga kesehatan, dan rezeki selalu dilimpahkan kepada ibu.

2. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Kedua. Terima kasih bapak atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sungguh-sungguh berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan serta segala arahan yang diberikan kepada saya. Semoga bapak selalu diberkahi kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan.
3. Bapak Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku dosen pembahas. Terima kasih bapak atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan saran dari bapak. Terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk lebih memahami tentang Kinerja. Semoga bapak selalu diberkahi kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan.
4. Devi Yulianti, S.A.N., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih bu atas saran, nasihat, bimbingan selama proses perkuliahan, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan ibu dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, serta kesehatan, dan rezeki selalu dilimpahkan kepada ibu.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Intan Fitri Meutia S.A.N., M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi amal jariyah dan menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya. Terimakasih juga atas pembelajaran saat perkuliahan yang bapak dan ibu berikan, khususnya kepada Bu Rahayu, Bu Meliyana, Bu Dewi, Bu Devi, Bu Selvi, Bu Ita, Bu Intan, Bu Dian, Bu Novita, Pak Dedi, Prof.Yuli, Pak Samsul, Pak Nana, Pak Eko, Pak Simon, dan Pak Izzul.
8. Mba Wulan dan Bapak Jauhari selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran adminstrasi skripsi hingga terselesaikan.
9. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Khususnya Ibu Sadariah, Ibu Dwi dan Bapak Habibillah selaku Bidang pengelolaan ruang laut, yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses turlap. Terima kasih Ibu dan bapak atas saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang Ibu dan bapak bagikan selama saya melakukan penelitian.
10. Ayah dan Ibuku tercinta. Terima kasih selalu mendoakan setiap saat, mendidik dan membesarkanku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, kesabaran dalam mengajarkanku, memberikan perhatian yang begitu luar biasa, memberikan semangat, dukungan dan doa di sepertiga malam yang tiada hentinya untuk hari-hariku, masa depan dan kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan rezeki untuk ibuku, yang menjadi sosok ayah juga bagiku selama aku tumbuh kembang menjadi anak yang dewasa. Terima kasih banyak, ini semua perjuangan kalian.

11. Kakakku, dan mbaku tersayang, Kanjeng Iwan, Kiyay Iqbal dan Kanjeng Putri. Terima kasih sudah selalu mendukung, mendengarkan, dan memberi nasihat kepada Penulis tetap semangat dan ingat tujuan awal masuk perkuliahan sampai selesai perkuliahan setiap saat. Persaudaraan kita adalah salah satu momen yang tidak terlupakan.
12. Sahabatku Atlantik (Angkatan Tujuh Belas Administrasi Publik): Rizki (ketan bucin dan nangisan), Hanif (sesepuh kampus), Kadek (gondar pisang), Dinan (anak teluk), Dwiyan (cuping), Rifky (opung), Ari (si raja joki), suryo (suara gahar), Ogi (preman kampus), Iyan (choliyan), Izal (golok), Dedi (tomboy), Aziz (ustad), Yuan (lambung), Gusti (Goten), Atan (tukang boong), Pandu (panjul). Dan semua Sahabat – sahabat Atlantik lainnya Tina, Nila, Meika, Cindy, Ana, Maul, Nafi, Hastin, Elva, Oca, Cory, Bayu, Kenda, Aldino, Bima, Andi, Fitri, Muslimah, Maharani, Rika, Ria, Sonia, Tami, Vera, Devi dan sahabat Atlantik lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan cerita selamu di kampus tercinta.
13. Abang – abang HIMAGARA Binter, Fery, Adikur, Idin, Suci, Nur, Astri, Dito, Nihan, Pindo, Sidik, Dimas, Leo, Zulham, Yoga, Dinda, Adigum, Adi, Rindu dan abang – abang lainnya. Terimakasih waktu atas cerita selama di kampus.
14. Adik – Adik Himagara Angger, Septri, Nico, Maya, Fasial, Diki, Haw, Dodi, Hana, Rafi, Azri, Casirin, Puja, Fatur, Ridho, Ega, Ginanjar, Lutfi, Arip, Sinta, Bella, Andre, Savira, Tiur, Rizki dan adik – adik lainnya. Terimakasih atas waktu dan cerita selama di kampus.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau pun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan siapapun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 9 Desember 2019
Penulis

Rizeki Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Kinerja.....	10
1. Pengertian Kinerja	10
2. Indikator Kinerja.....	11
3. Pengukuran Kinerja	16
4. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	17
5. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....	18
6. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	19
B. Tinjauan Tentang Manajemen.....	20
C. Tinjauan Tentang Program	21
D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat	22
E. Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir	24
F. Kerangka Berpikir	25
III. METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33

1. Wawancara	33
2. Observasi	34
3. Dokumentasi.....	34
F. Teknik Analisi Data	35
1. Reduksi Data.....	35
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	36
3. Membuat Kesimpulan.....	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	37
1. Derajat Kepercayaan (<i>credibility</i>)	37
2. Keteralihan (<i>transferability</i>).....	38
3. Kebergantungan (<i>dependability</i>)	38
4. Kepastian Data (<i>confirmability</i>)	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran Umum Masyarakat Pesisir Provinsi Lampung	40
2. Gambaran Umum Penduduk dan Geografis Provinsi Lampung	43
a. Penduduk Povinsi Lampung	43
b. Keadaan Geografis.....	44
3. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.....	45
a. Dasar Hukum dan Visi Misi Organisasi DKP Provinsi Lampung	45
b. Tugas pokok dan Fungsi Dinas DKP Provinsi Lampung	46
c. Struktur Organisasi DKP Provinsi Lampung.....	48
4. Gambaran Umum dan Fungsi Bidang Pengelolaan Ruang laut	51
5. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir.....	54
B. Hasil Penelitian	55
1. Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018	56
a. Masukan (<i>Input</i>).....	56
b. Proses (<i>Process</i>).....	64
c. Keluaran (<i>Output</i>).....	68
d. Hasil (<i>Outcome</i>).....	77
C. Pembahasan.....	85
1. Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018	85
a. Masukan (<i>Input</i>).....	85
b. Proses (<i>Process</i>).....	90

c. Keluaran (<i>Output</i>)	92
d. Hasil (<i>Outcome</i>)	94
2. Penapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun 2018.....	98
V. KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Potensi Kelautan Provinsi Lampung	3
2. Kegiatan PEMP	5
3. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	44
4. Jumlah Pegawai DKP Provinsi Lampung	51
5. Jumlah Pegawai DKP Bidang Pengelolaan Ruang Laut	53
6. Anggaran Kegiatan Program PEMP Tahun 2018	62
7. Sasaran Renstra OPD Terhadap Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019	78
8. Indikator Kinerja Utama (IKU)	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	28
2. Desa Umbul Asem, Desa Sidodadi dan Desa Pagar jaya.....	42
3. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	50
4. Struktur organisasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	52
5. Alokasi Anggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2015-2019	61
6. Kegiatan Perencanaan Penataan Ruang Dan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	68
7. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Perairan dan Jenis Biota	70
8. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	71
9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.....	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tiga perempatnya merupakan wilayah perairan, dengan luas sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 juta km² Perairan Nusantara dan 2,7 km² Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia yaitu 17.504 pulau serta mempunyai panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang garis pantai 73,7 ribu km². Hal tersebut menjadikan laut Indonesia memiliki sumber daya laut dan pesisir serta keanekaragaman hayati yang amat besar. (Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS, 2017)

Laut Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, potensi itu senilai 1.772 triliun, 312 triliunnya adalah dari perikanan, 45 Triliun dari terumbu karang, 21 triliun dari mangrove, 4 triliun dari lamun, 560 triliun potensi kekayaan pesisir, 400 triliun bioteknologi, 20 triliun wisata bahari, 210 triliun minyak bumi, dan 200 triliun dari transportasi Laut. (Sumber: <http://lipi.go.id/siaranpress/riset-untuk-optimalisasi-potensi-hayati-dan-ekonomi-laut-indonesia/>, di akses pada tanggal 20 Juni 2019).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber daya laut dan pesisir secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) antara lain sumber daya perikanan dan hayati seperti mangrove, terumbu karang, serta padang lamun. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resource*) antara lain sumber daya mineral yang terkandung dalam laut seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya dan jasa-jasa lingkungan (*enviromental service*) antara lain wisata maritim dan industri maritim. Potensi tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun juga memiliki nilai sosial yang dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah pesisir di Indonesia. (Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS, 2017)

Sekitar 15,61 % wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan berada di tepi laut, setiap tahun jumlah penduduk meningkat cepat beserta intensitas pembangunannya, faktanya bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah sayangnya tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Terbatasnya kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan para nelayan tetap

bertahan, banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia menjadi negara yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aspek kelautan, pembangunan sektor pesisir dan laut dijadikan sebagai tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Wilayah ekosistem laut dan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai karakteristik unik yang membutuhkan pengelolaan secara bijaksana dan terpadu sehingga wilayah ini mampu memberikan nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS, 2017)

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki daerah kelautan dan pesisir yang cukup luas adalah Provinsi Lampung, luas lautnya diperkirakan seluas 24.820 km², meliputi jarak 12 mil dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.150 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Tabel 1. Potensi Kelautan Provinsi Lampung

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir	Panjang Pantai (km)
1.	Lampung Selatan	41	26	247,76
2.	Bandar Lampung	2	26	27,01
3.	Lampung Timur	5	17	108
4.	Pesawaran	38	18	96
5.	Lampung Tengah	-	9	-
6.	Pesisir Barat	3	99	210
7.	Tulang Bawang	-	22	51,90
8.	Tanggamus	43	46	210

(Sumber: DKP Provinsi Lampung Tahun 2018)

Gambaran cakupan pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki desa pesisir dan potensi kelutan dan perikanan di provinsi Lampung, seperti pada Tabel 1. Luas wilayah Provinsi Lampung tersebut merupakan potensi yang menempatkan Lampung sebagai Provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, termasuk didalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan non hayati bernilai ekonomi tinggi. (Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2015-2019)

Sumber daya yang besar tersebut wilayah pesisir Provinsi Lampung mempunyai permasalahan menyeluruh yang berdampak bagi masyarakat pesisir antara lain belum ada tata ruang darat, pesisir, dan laut yang secara terpadu mendukung sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan, pada umumnya usaha sektor kelautan dan perikanan bersifat tradisional dan tidak dikembangkan, orientasi pembangunan domain ke darat, bukan ke lautan sehingga akibatnya pemanfaatan kurang efisien, produktif atau tidak ramah lingkungan. (Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2015-2019)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengelolaan laut berupaya mengoptimalkan sumber daya laut dan masalah di perairan pesisir tersebut dengan mengeluarkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), program tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran antara lain peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, dan pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil. (Sumber: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2015-2019)

Tabel 2. Kegiatan PEMP

NO.	KEGIATAN PROGRAM
1.	Perencanaan Penataan Ruang dan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perairan dan Jenis Biota
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
5.	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
6.	Kegiatan Penyebarluasan mitigasi Bencana
7.	Operasional Badan Pengelolaan Pulau Batang Besar dan Pulau Batang Kecil Provinsi Lampung
8.	Hari Nusantara
9.	Kegiatan Bidang KP3K
10.	Identifikasi dan Pencadangan Calon Kawasan Konservasi Pulau Batang – Segama
11.	Inisiasi Perubahan Naskah Akademik (data dukung) Perda Zonasi

(Matrik Program dan Kegiatan DKP Lampung Rev 2 -Tahun 2017)

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sudah berjalan dari tahun 2015, dilaksanakan di kabupaten/kota yang memiliki potensi wilayah kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Program ini mempunyai 11 kegiatan yang tersaji pada Tabel 2, tetapi pada tahun 2018 terdapat keluhan dan kendala terhadap kegiatan berdasarkan data dari evaluasi Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di DKP Provinsi Lampung, kegiatan dari program ini berjalan tidak konsisiten, ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan pada tahun 2018 yang membuat program ini tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (DKP Provinsi Lampung 2019)

Menurut Ridho Ficardo (Gubernur Lampung Tahun 2014-2019), permasalahan pesisir Lampung belum banyak tersentuh secara terpadu. Wilayah pesisir menjadi sumber kemiskinan karena akses pendidikan rendah, daya beli rendah, dan tingkat kesehatan juga masih rendah. Pembangunan wilayah pesisir pengelolaan masih bersifat sektoral, instansi dan institusi bergerak secara sektoral dengan koordinasi yang lemah. Demikian halnya di bidang infrastruktur seperti keterbatasan air bersih dan sanitasi. Permukiman tidak teratur dan cenderung kumuh, erosi pantai, sedimentasi, infiltrasi air laut, dan pemanfaatan daerah pantai yang tidak sesuai dengan potensi yang ada. (Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/21/ozrjkm280-pemprov-lampung-gulirkan-program-pembangunan-pesisir>, di akses pada 18 Desember 2018 pada pukul 13.05)

Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 63 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Pemberdayaan Masyarakat dimana pemerintah maupun pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat serta mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau - pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi, menjalankan kebijakan, penyediaan dukungan, pengendalian, Penataan dan pengelolaan, pembinaan dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keberadaan Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat menjalankan perannya dengan maksimal dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat di pembangunan wilayah pesisir, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian bantuan serta meningkatkan sarana dan prasarana seperti perumahan, pendidikan, kesehatan baik berupa fasilitas maupun asuransi misalnya BPJS, Jamkesmas, dan Jamkesda, perekonomian, transportasi, dan telekomunikasi, serta pengembangan industri mikro dan kecil. Sehingga perangkat hukum dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan melalui pengelolaan, pemanfaatan sumber daya laut pesisir secara selaras dan seimbang.

Berdasarkan fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang lebih baik dan maksimal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terutama dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian organisasi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan maupun program sesuai tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mahsun (2013:25), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan ciri organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Berkaitan dengan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan publik dan teknis kepada seluruh masyarakat maka dibutuhkan ukuran kualitas pelayanan berupa penilaian

kinerja organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Mahsun (2013:32) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi, indikator tersebut adalah indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcomes*). Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan. Sehingga dengan demikian pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara yang mengkaji tentang kinerja organisasi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan – masukan bagi instansi-instansi terkait terutama terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Menurut Mahsun (2013:25), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan ciri organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkatan keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Rivai, Basri dalam Sinambela (2012:6), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Selanjutnya menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012: 186), kinerja organisasi

didefinisikan sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Sedangkan menurut Bernadin dan Russel dalam Sinambela (2012: 186), kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu. Pengertian kinerja disini tidak bermaksud menilai karakteristik individu tetapi mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu proses dan hasil kerja atau tingkat pencapaian dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Kinerja

Menurut Lohman (2003) dalam Mahsun (2013:31), terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja organisasi, antara lain:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan biaya (misalnya biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya yang berhubungan dengan

persediaan, biaya distribusi, dan sebagainya), dan assets (biaya angkut persediaan).

2) *Output*

Output berkaitan dengan keuangan (penjualan, keuntungan, *return on investmen*), waktu (waktu respon, dan ketepatan waktu), dan kualitas (keluhan pelanggan, kerusakan pengiriman).

3) *Fleksibilitas*

Fleksibilitas berkaitan dengan *Fleksibilitas volume* (kemampuan merespon perubahan permintaan), *fleksibilitas pengiriman* (tingkat kecepatan), *fleksibilitas campuran* (kemampuan melayani berbagai jenis permintaan), dan *produk baru dan modifikasian* (kemampuan menciptakan produk baru atau memodifikasi).

Sedangkan Menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo (2017:86-88) terdapat tujuh indikator kinerja, yaitu:

1) *Tujuan*

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2) *Standar*

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai

standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3) Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Umpan balik dilakukan dengan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4) Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5) Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

6) Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

7) Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

Mahsun (2013:32) memaparkan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan atau program. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan.
- 2) Proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses yaitu semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah *input* menjadi *output* (keluaran) yang berbentuk produk atau jasa.
- 3) Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
- 4) Hasil (*outcome*) adalah dampak suatu program kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat,

sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara *outcome* kegiatan telah dicapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome* instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

- 5) Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil atau *outcome*. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dan lain-lain).
- 6) Dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran kenapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Berdasarkan beberapa indikator yang dikemukakan oleh ahli tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun (2013:32) dalam menilai Kinerja Organisasi DKP Povinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir tahun 2018. Namun dari enam indikator yang dikemukakan oleh Mahsun tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat indikator, yakni: indikator masukan (*input*), indikator proses (*process*), indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcomes*).

3. Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2010:12), pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Selanjutnya menurut Mahmudi (2010:14), pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah :

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya;

- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
 - a. pemberian *reward and punishment*;
- e. Memotivasi pegawai;
- f. Menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Mahsun (2013: 26), pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Kemudian hasil dari pengukuran kinerja akan memberi tahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat atau cara untuk mengetahui atau menilai sejauh mana tujuan, sasaran serta program dari suatu organisasi dapat tercapai yang bertujuan untuk meningkatkan suatu kinerja organisasi.

4. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan Pengukuran Kinerja menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:85) mempunyai tiga tujuan yaitu :

- a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokuskan pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
- d. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
- e. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- f. Memperbaiki pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan.
- g. Memotivasi pegawai.
- h. Menciptakan akuntabilitas publik.

5. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:97) terdapat tiga elemen pengukuran kinerja, yaitu :

1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi publik. Kemudian ditentukan sasaran yaitu tujuan organisasi yang dinyatakan secara eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran itu akan dicapai. Selanjutnya ditentukan strategi pencapaiannya yang menggambarkan bagaimana mencapainya.

2) Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penelitian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

3) Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran

Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran yang telah ditetapkan.

6. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan menajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja menurut Mahsun (2013:33-34) baik untuk internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menuju peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Menurut Mahsun (2013:33) sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik.

B. Tinjauan Tentang Manajemen

Manajemen adalah suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi, organisasi formal maupun non formal. Menurut Henri Fayol dalam Eko Budi Sulistio dan Rahayu sulistiowati (2014:92) manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan koordinasi. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara intergal, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut George Terry dalam Eko Budi Sulistio dan Rahayu sulistiowati (2014:95) mendefinisikan manajemen dan fungsi manajemen yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi – fungsi manajemen apa yang direncanakan itu yang akan dicapai, sebelum kita melakukan perencanaan merumuskan dulu tujuan yang akan dicapai, perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

C. Tinjauan Tentang Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan.

Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai,
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan,
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui,
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan,
- e. Strategi pelaksanaan.

Menurut Charles O. Jones (1996:295), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai tujuan yang akan dicapai, kegiatan yang akan diambil, perkiraan anggaran dan strategi pelaksanaan. Penelitian ini yaitu program

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Mardikanto dkk (2013:28) pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lainnya.

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (Pendidikan dan Kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan

4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Menurut Anthony Bebington dalam Mardikanto dkk (2013:30), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dengan titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam pemberdayaan ini, upaya yang penting adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan,

serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana fisik, meliputi irigasi, jalan, listrik maupun bidang sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah.

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat dari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.

E. Tinjauan Tentang Masyarakat Pesisir

Menurut Satria dalam Ikhsani (2011) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya

pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat pesisir adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dalam sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya dan sangat beragam identitas, spesialisasi pekerjaan, derajat sosial, pendidikan serta latar belakang budayanya.

F. Kerangka Berpikir

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki daerah kelautan dan pesisir yang cukup luas adalah Provinsi Lampung, luas lautnya diperkirakan seluas 24.820 km², meliputi jarak 12 mil dari garis pantai yang merupakan

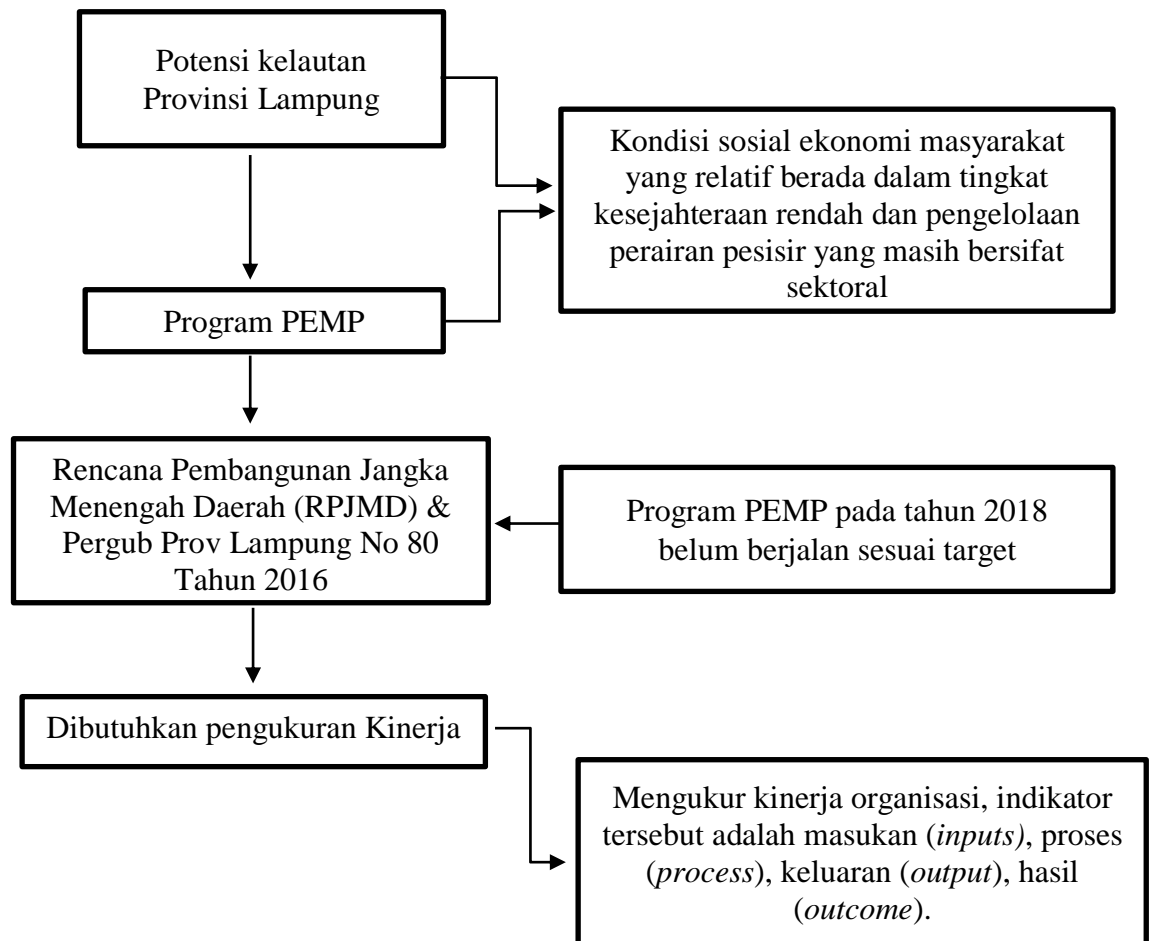
kewenangan perairan laut Provinsi Lampung. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.150 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Sumber daya yang besar tersebut wilayah pesisir Provinsi Lampung mempunyai permasalahan menyeluruh yang berdampak bagi masyarakat pesisir antara lain belum ada tata ruang darat, pesisir, dan laut yang secara terpadu mendukung sektor-sektor ekonomi kelautan dan perikanan, pada umumnya usaha sektor kelautan dan perikanan bersifat tradisional dan tidak dikembangkan, orientasi pembangunan domain ke darat, bukan ke lautan sehingga akibatnya pemanfaatan kurang efisien, produktif atau tidak ramah lingkungan. (DKP Provinsi Lampung 2019)

Provinsi Lampung mempunyai Potensi perekonomian kelautan yang besar, namun masih banyak masyarakat Lampung kondisi sosial ekonominya dalam tingkat kesejahteraan yang rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan organisasi yang menangani Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengadakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang sesuai dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Gubernur Lampung yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran antara lain peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, dan pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil.

Tetapi terdapat kurang efisien nya dalam menjalankan program tersebut, program yang mempunyai 11 kegiatan yang tersaji pada Tabel 2, tetapi pada tahun 2018 teradapat keluhan dan kendala terhadap kegiatan berdasarkan data dari evaluasi Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di DKP Provinsi Lampung, kegiatan dari program ini berjalan tidak konsisiten, ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan pada tahun 2018 yang membuat program ini tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan dari program ini secara garis besar belum menyelesaikan permasalahan daerah pesisir, Ridho ficardo (Gubernur Lampung Tahun 2014-2019) juga mengungkapkan pembangunan wilayah pesisir pengelolaan masih bersifat sektoral, instansi dan institusi bergerak secara sektoral dengan koordinasi yang lemah.

Melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2018 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, maka dari itu, peneliti melakukan penilaian kinerja untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari program tersebut dengan menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun (2013:32) yaitu masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*).



Gambar 1. Kerangka Berpikir
(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2018)

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan ialah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan di lapangan, serta foto. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka. penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong (2017:94), ada dua maksud

tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Penelitian kualitatif ini yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun (2013:32). Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator Masukan (*Input*) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, kebijakan, dan waktu, yang dipergunakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

- Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Ketersediaan anggaran dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat pesisir

b) Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses (*Process*) melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

- Menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Ketepatan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

c) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran (*Output*) merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, baik itu berupa barang ataupun jasa. Dalam indikator ini ukuran yang digunakan untuk mengukur keluaran (*output*) yaitu dengan cara menguraikan keberhasilan program.

d) Indikator Hasil (*Outcomes*)

Indikator Hasil (*Outcomes*) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. Dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :

- Menguraikan pencapaian tujuan dari kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- Dampak terhadap masyarakat atas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dilihat sejauhmana kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung dalam kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Terfokus pada Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Alasannya dilakukannya penelitian berlokasi di DKP Provinsi Lampung karena

DKP Provinsi Lampung sebagai institusi yang meliputi jarak 12 mil dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut DKP Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dalam pembangunan perairan pesisir dan pengelolaan laut, yang mempunyai fungsi menjalankan kebijakan, penyediaan dukungan, pengendalian, Penataan dan pengelolaan, pembinaan dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pergub, perundang-undangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2017:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan, serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan focus penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan observasi pada kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Moleong (2017:186) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan atas jawaban itu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang terfokus dalam kegiatan program PEMP yang sesuai dalam panduan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai dapat di lihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan	Waktu
1.	IBU SADARIAH	Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	10 September 2019 Pukul 14.25 di ruangan bidang pengelolaan ruang laut
2.	IBU DWI	Seksi Tata ruang dan Pemberdayaan masyarakat pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	23 Juli 2019 Pukul 13.03 di ruangan bidang pengelolaan ruang laut
3.	BAPAK A.D. HABIBILLAH	Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	30 Juli 2019 Pukul 14.50 di ruangan bidang pengelolaan ruang laut

No	Informan	Jabatan	Keterangan	Waktu
4.	BAPAK YUDI	Sekretaris Desa Pagar Jaya	Aparatur Desa Pagar Jaya	12 September 2019 Pukul 13.24 di rumah bapak Yudi
5.	BAPAK AHMAD HUSIEN	Kelompok Pokdarwis (Kelompok sadar wisata)	Masyarakat Desa Pagar Jaya	12 September 2019 Pukul 15.26 di rumah bapak Ahmad Husein
6.	BAPAK RAHMAN	Kelompok Pokdarwis (Kelompok sadar wisata)	Masyarakat Desa Pagar Jaya	12 September 2019 Pukul 16.25 di rumah bapak Ahmad Husein
7.	BAPAK BUYUNG SAPUTRA	Ketua RT 08 Desa Sidodadi	Aparatur Desa Sidodadi	13 September 2019 Pukul 13.48 di rumah bapak Buyung Saputra
8.	BAPAK ICHWAN WIJAYANTO	Nelayan	Masyarakat Desa Sidodadi	15 September 2019 Pukul 17.19 di rumah bapak Ichwan Wijayanto
9.	BAPAK LIPAH	Nelayan	Masyarakat Desa Sidodadi	15 September 2019 Pukul 18.42 di rumah bapak Lipah

(Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2019)

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Berkaitan penelitian ini, penelitian melaksanakan observasi langsung pada lokasi penelitian yang ditetapkan yaitu di Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Lampung dengan bagian perencanaan, tata ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan

triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian teknik dokumentasi juga berguna untuk melengkapi kekurangan yang diperoleh dari data primer.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan - keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-

catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penilaian serta hasil kegiatan program dimiliki Dinas kelautan dan perikanan provinsi lampung dalam program tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian teks naratif, tabel, foto atau gambar untuk menjelaskan kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

3. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori

yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2017:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penetapan kriteria derajat kepercayaan (kreadibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonaktualitatif. Kriteria ini berfungsi:

- a. melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai,
- b. mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kreadibilitas atau derajat kepercayaan yaitu triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil peneliti tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, peneliti membuat rincian berupa transkrip wawancara melalui tabel triangulasi, peneliti juga menyusun hasil penelitian berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berupa foto atau gambar yang disusun secara berurutan sesuai fokus dalam penelitian ini dan dikaitkan satu sama lain dengan teori yang peneliti gunakan.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian Data (*confirmability*)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat

terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan kegiatan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Kegiatan program belum mencapai tujuannya dikarenakan hanya 5 kegiatan program yang terlaksana dari 11 kegiatan, dan hanya satu kegiatan yang memfokuskan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukannya kendala yang dialami Dinas kelautan dan Perikanan pada bidang yang menjalankan kegiatan program bidang pengelolaan ruang laut.

Kendala – kendala tersebut di uji dengan menggunakan teori kinerja dari Mahsun (2013:32) yang meliputi masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Secara garis besar kendala – kendala mengenai kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di bidang pengelolaan ruang laut tersebut meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih kurang dalam membidangi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan kurangnya persiapan anggaran dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kendala – kendala tersebut merupakan bagian dari indikator yang meliputi masukan (*inputs*), proses

(*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Kendala – kendala tersebut mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di bidang pengelolaan ruang laut dapat dilihat dari hasil peneliti paparkan pada indikator keluaran (*Output*) yang menjelaskan bahwa kinerja pada kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2018 masih belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung seharusnya menambahkan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK)/Honorar yang sesuai dengan ahli yang membidangi dalam memberdayakan masyarakat ekonomi pesisir dalam membantu kegiatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sehingga kegiatan program berjalan dengan baik.
2. Memfokuskan dan menambahkan kegiatan program dalam kegiatan memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir .
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung harus melaksanakan semua kegiatan dari program tersebut, maka dari itu perlu ada nya analisis dan perencanaan yang baik dari dinas agar semua kegiatan program dapat berjalan dengan baik, sesuai target dan sesuai dengan pengeluaran anggaran sehingga tidak terjadi kurangnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ardana, Komang, dkk. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Eko Budi Sulistio dan Rahayu sulistiowati. 2014. *Azas – Azas Manajemen*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung. Fokusmedia.
- Sinambela, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Aditama.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Depok: PT. Raja grafindo Persada.

Sumber Jurnal:

Ikhsani, Fandi Winna. 2011. *Optimasi Pengelolaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu Macan Pada Kelompok Sea Farming Di Pulau Panggang Kabupaten Administratif Kepulauan*. Bogor.

Sumber Website:

<http://lipi.go.id/siaranpress/riset-untuk-optimalisasi-potensi-hayati-dan-ekonomi-laut-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019

<https://www.bps.go.id/publication/2017/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2017.html>, diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pada pukul 14.32

<https://lampung.bps.go.id/publikasi.html/provinsi-lampung-dalam-angka-2019>, diakses pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 20.15

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/21/ozrjkm280-pemprov-lampung-gulirkan-program-pembangunan-pesisir>, diakses pada 18 Desember 2018 pada pukul 13.05

<https://www.kupastuntas.co/2019/01/29/dkp-laporkan-dugaan-reklamasi-ilegal-pulau-tegal>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pada pukul 21.00

<https://www.google.co.id/radarlampung.co.id/2019/08/07/serangkaian-perizinan-yang-dilakukan-tegal-mas-thomas/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pada pukul 21.34

<https://bandarlampungkota.go.id/new/statis36-Sejarah-Singkat.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pada pukul 23.00

<https://kkp.go.id/kategori/320-Rencana-Strategis-> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pada pukul 21.20

Sumber Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemertintah.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 5 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 63 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Sumber lainnya:

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2015-2019.